

Global Corruption Barometer 2009

Transparency International



Transparency International Indonesia
Jl. Senayan Bawah No. 17
Jakarta 12180
Indonesia
Tel: +62-021-7208515
Fax: +62-021-7267815
Email : info@ti.or.id
Website : www.ti.or.id

Mengenai TI-Indonesia:

TI-Indonesia didirikan pada Oktober 2000. TI-Indonesia merupakan salah satu chapter dari Transparency International yang berkedudukan di Berlin, Jerman.

Transparency International – yang didirikan pada tahun 1993 – merupakan satu-satunya organisasi non pemerintah dunia dan non-profit yang mencurahkan perhatian secara khusus memberantas korupsi.

Transparency International saat ini memiliki 99 national chapter di berbagai belahan dunia. Untuk informasi lebih lanjut mengenai TI-Indonesia, silahkan mengakses website <http://www.ti.or.id>



Kontak Media :

Teten Masduki
Sekretaris Jenderal
Hp: 0811193391
Email: tmasduki@ti.or.id

Frenky Simanjuntak
Manajer Riset dan Kebijakan
Hp: 08161356473
Email: fsimanjuntak@ti.or.id

 **TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
INDONESIA**
the coalition against corruption

<http://www.ti.or.id>
Jl. Senayan Bawah No. 17
Jakarta 12180
Indonesia
Tel: +62-021-7208515
Fax: +62-021-7267815
Email: info@ti.or.id

Siaran Pers

Barometer Korupsi Global 2009 Transparency International

Survei Barometer Korupsi Global (BKG) yang dilaksanakan oleh Transparency International (TI) secara akumulatif menunjukkan bahwa publik memiliki persepsi negatif terhadap kehidupan politik dan menganggap partai politik sebagai institusi yang paling banyak dipengaruhi oleh korupsi. Namun bila dilihat satu persatu, maka temuan survei BKG di setiap negara tergantung pada situasi kontekstual negara tersebut.

Survei BKG dilaksanakan di 69 negara dengan total responden 73.132 orang. Survei ini dilaksanakan atas nama *Transparency International* oleh Gallup International sebagai bagian khusus dari survei tahunannya, "*Voice of The People Survey*."

Dari 69 negara yang disurvei, 13 negara menempatkan sektor bisnis/swasta sebagai sektor yang paling korup. Ada 11 negara yang menempatkan pelayanan publik sebagai sektor yang paling korup. Opini publik di setiap negara tentunya sangat berkaitan dengan konteks situasi terkini di negara tersebut, yang pasti berbeda satu dengan lainnya.

Survei BKG mengeksplorasi pandangan masyarakat umum tentang korupsi dan pengalaman tentang terjadinya suap di seluruh dunia. Survei ini mengukur seberapa jauh institusi-institusi kunci dan pelayanan publik di sebuah negara dipersepsikan masyarakatnya sebagai korup. Survei ini juga mengukur pandangan masyarakat tentang usaha pemerintah dalam melawan korupsi.

Untuk pertama kalinya sejak survei ini diluncurkan, tahun ini BKG mencoba mengukur pendapat masyarakat tentang fenomena *state capture* di negara-negara yang disurvei dan menanyakan kesediaan responden untuk membayar lebih pada perusahaan yang berperilaku bersih dan tidak korup. Pengukuran persepsi publik tentang korupsi dalam institusi-institusi kunci dan pelayanan publik dilakukan terhadap 7 institusi. Ketujuh institusi tersebut adalah partai politik, parlemen, sektor bisnis/swasta, media, pejabat pelayanan publik, dan peradilan.

Sebagai survei tentang opini publik, kriteria responden dalam BKG adalah mereka yang berusia 16 tahun ke atas. Untuk menjaga tingkat keterwakilan, di beberapa negara sampel diambil dengan mempertimbangkan proporsi gender, usia, dan penghasilan.

Parlemen Masih Menjadi Sarang Korupsi

Di Indonesia pengumpulan data survei BKG di Indonesia dilakukan di daerah perkotaan, yaitu di Jakarta (300 responden) dan Surabaya (200 responden) dengan total 500 orang responden, pada tanggal 11-20 November 2008. Situasi negara pada saat survei dilaksanakan tentu mempengaruhi opini responden yang diwawancarai. Saat itu kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota DPR marak diberitakan. Survei BKG menunjukkan, opini publik terhadap parlemen, disusul kemudian dengan institusi peradilan, masih buruk. Publik melihat bahwa lembaga-lembaga ini masih sangat korup.

Kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, seperti kasus Al Amien Nasution, Bulyan Royan, dan pengakuan Hamka Yamdu, semuanya terungkap secara jelas kepada publik sampai ke detail-detailnya. Kasus-kasus tersebut membuat persepsi masyarakat terhadap lembaga pembawa aspirasi rakyat ini tetap buruk, terutama dalam konteks korupsi. Kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat kejaksaan juga masih sangat hangat dibicarakan pada saat itu. Tidak dapat dihindari bahwa opini publik terhadap kinerja kedua institusi tersebut sangat dipengaruhi oleh kasus-kasus tersebut.

Di sisi lain, survei BKG menunjukkan bahwa responden di Indonesia melihat usaha pemerintah dalam pemberantasan korupsi sudah berjalan efektif. TI-Indonesia menilai bahwa opini positif ini terbentuk di masyarakat dari performa institusi-institusi yang selama ini dianggap cukup independen, seperti KPK, Pengadilan Tipikor, dan juga Badan Pemeriksa Keuangan. Bila survei BKG menunjukkan bahwa politik masih menjadi sarang dari korupsi, maka institusi-institusi seperti ini selayaknya dijaga dari intervensi politik yang berorientasi kepentingan sesaat.

Dalam survei BKG sebelumnya, yaitu tahun 2006 dan 2007, DPR juga selalu dinilai sebagai institusi yang korup, bersama dengan institusi peradilan, dan kepolisian (lihat tabel). Pandangan negatif terhadap performa DPR juga tertangkap dalam jajak pendapat yang dilakukan oleh harian *Kompas* pada 1-2 April 2009. Di dalam jajak pendapat tentang pandangan publik terhadap kinerja DPR, 67,3% responden dari total 844 responden menganggap citra DPR saat ini masih terpuruk. Dalam hal korupsi, Litbang *Kompas* mencatat, paling tidak ada tujuh kasus besar yang melibatkan anggota DPR. Dugaan kasusnya beragam: penyelewengan proyek pengadaan alat pemadam kebakaran, pengalihan fungsi hutan lindung, alih fungsi hutan mangrove, pembelian kapal patroli, dan aliran dana Yayasan Pertamina.

Tabel perbandingan skor dan urutan terkorup Institusi di Indonesia menurut Barometer Korupsi Global dari tahun ke tahun** (rentang skor 1-5; 1=tidak korup sama sekali, 5=sangat korup)

	2004	2005	2006	2007	2009
Partai politik	4,4 *	4,2 *	4,1	4,0	4,0
Legislatif	4,4 *	4,0	4,2*	4,1	4,4*
Kepolisian	4,2	4,0	4,2*	4,2*	-
Lembaga peradilan	4,2	3,8	4,2*	4,1	4,1

*=institusi dengan skor paling tinggi/paling korup pada tahun itu

**= Survei BKG dilaksanakan pertama kali tahun 2003, tetapi metodenya berbeda dengan survei-survei di tahun-tahun selanjutnya. Pada tahun 2008 TI Secretariat tidak meluncurkan BKG.

Kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan. Temuan survei BKG ternyata didukung oleh temuan riset-riset yang dilakukan lembaga lain. Temuan ini menunjukkan bahwa opini masyarakat tentang korupsi di DPR sangat buruk. Tentunya hal ini harus menjadi agenda utama bagi anggota DPR saat ini dan juga bagi calon anggota DPR baru yang saat ini sudah bersiap-siap untuk duduk di kursi di Senayan.

Usaha keras harus dilakukan untuk membersihkan citra institusi ini sehingga bisa mendapat kepercayaan lagi dari masyarakat. Untuk itu, berkaitan dengan peluncuran hasil survei BKG, TI-Indonesia meminta agar:

1. DPR berbenah diri dengan mekanisme yang saat ini ada di dalamnya. Melalui Badan Kehormatan-nya, DPR seharusnya bisa mencegah peluang anggota-anggotanya sendiri untuk melakukan korupsi. Fungsi kontrol dan hukuman yang dimiliki Badan Kehormatan seharusnya ditegakkan.
2. DPR harus menunjukkan usaha serius dan dapat terlihat hasilnya. Salah satu contoh usaha tersebut misalnya dengan menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi secepat mungkin sehingga masyarakat bisa melihat bahwa ada perbaikan dalam kinerja DPR untuk pemberantasan korupsi
3. DPR seharusnya tidak menunjukkan sikap yang dapat diinterpretasikan oleh publik sebagai bentuk resistensi terhadap institusi pemberantas korupsi, misalnya dengan cara menumpulkan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau mewacanakan pembubaran KPK. Sikap seperti ini akan semakin melemahkan posisi DPR sendiri di mata publik. DPR akan terus dilihat sebagai institusi yang korup dan mendukung koruptor.

Jakarta, 3 Juni 2009



Teten Masduki

Sekretaris Jendral TI-Indonesia

Barometer Korupsi Global 2009

Ringkasan Eksekutif

Barometer Korupsi Global Transparency International 2009 (*TI's Global Corruption Barometer*) mengemukakan temuan-temuan utama dari jajak pendapat umum yang menilai pandangan publik mengenai korupsi dan pengalaman publik terkait suap di seluruh dunia.¹ Barometer ini menilai sejauh mana lembaga-lembaga utama dan layanan publik dianggap korup, di samping mengukur pandangan warga negara terhadap upaya-upaya pemerintahnya dalam memerangi korupsi. Dan tahun ini, untuk pertama kalinya, Barometer juga mencakup pertanyaan yang terkait dengan *state capture* (tindakan memberi suap untuk memengaruhi pembuatan undang-undang dan kebijakan) dan kesediaan masyarakat membayar premium untuk menciptakan perilaku perusahaan bersih.

Barometer dirancang untuk melengkapi pendapat ahli yang dimuat dalam Indeks Persepsi Korupsi TI dan informasi mengenai aliran suap internasional yang tercermin dari Indeks Suap TI. Barometer juga bertujuan menyediakan informasi tentang tren persepsi publik terhadap korupsi. Dalam edisi keenamnya, Barometer memungkinkan dibuatnya asesmen perubahan secara lintas waktu, baik dalam hal lembaga yang dianggap sebagai yang paling korup, mau pun dari segi efektifitas upaya pemerintah dalam memerangi korupsi, serta jumlah warga negara yang melakukan suap.²

Barometer Korupsi Global 2009 mewawancarai 73.132 orang di 69 negara dan wilayah dalam kurun waktu antara Oktober 2008 dan Pebruari 2009. Temuan-temuan utama survei tersebut adalah sebagai berikut:

Korupsi di dan oleh sektor swasta memrihatinkan publik umum

- Sektor swasta dianggap korup oleh separuh orang yang diwawancarai: jumlah ini menunjukkan peningkatan 8 persen dari lima tahun yang lalu.
- Publik bersikap kritis terhadap peran sektor swasta dalam proses pembuatan kebijakan negara mereka. Lebih dari separuh responden berpendapat bahwa suap sering digunakan untuk mempengaruhi agar kebijakan dan peraturan dibuat sesuai dengan kepentingan perusahaan tertentu. Persepsi ini terutama banyak dimiliki oleh mereka yang berasal dari Negara-negara yang Baru Merdeka³, dan persepsi ini sedikit menurun di negara-negara di Amerika, Balkan Barat, dan Turki.
- Korupsi merupakan hal yang sangat memrihatinkan konsumen. Separuh dari responden menunjukkan kesediaan mereka untuk membayar sejumlah premium dengan membeli dari perusahaan yang “bebas korupsi”.

¹ Survei Barometer Korupsi Global yang meliputi sejumlah besar negara dilaksanakan oleh Gallup Internasional untuk Transparency International (TI) sebagai bagian dari Survei Suara Masyarakat. Untuk Barometer 2009, TI juga secara mandiri menugaskan 15 perusahaan jajak pendapat untuk mengumpulkan data di 19 negara tambahan yang tidak dicakup oleh Survei Suara Masyarakat. Untuk informasi terperinci mengenai metodologi survei, lihat Lampiran A..

² Pertanyaan yang diajukan dalam Barometer tidak sama untuk setiap edisi, jadi perbandingan lintas waktu hanya dapat dilakukan untuk pertanyaan yang telah muncul di 2 edisi atau lebih. Barometer 2009 dibandingkan edisi-edisi yang memuat pertanyaan yang sama. Kalau temuan komparatif ditemukan di beberapa edisi, hasil 2009 telah dibandingkan dengan hasil yang paling dulu muncul.

³ *Newly Independent States*+ rmengacu pada Negara-Negara yang Baru Merdeka dan and Mongolia.

Partai Politik dan Layanan Publik pada umumnya dipandang sebagai sektor paling korup⁴

- Di seluruh dunia, responden melihat partai politik sebagai lembaga dalam negeri yang paling korup, disusul secara ketat oleh lembaga pelayanan publik.
- Namun demikian, hasil agregat menunjukkan perbedaan penting antara satu negara dengan negara lainnya. Dalam 13 negara yang diambil sampelnya, sektor swasta dianggap sebagai yang paling korup, sementara di 11 negara responden menganggap sektor peradilan lah yang paling korup.

Pengalaman Kasus Suap Skala Kecil dilaporkan meningkat di beberapa bagian di dunia – pihak kepolisian cenderung menjadi pihak yang menerima suap

- Lebih dari 1 dari 10 orang yang diwawancarai melaporkan pernah membayar suap dalam 12 bulan terakhir. Ini menunjukkan tingkat penyuaipan yang ditengarai dalam Barometer 2005. Bagi 4 dari 10 responden yang membayar suap, jumlah suap yang dibayar, secara rata-rata berjumlah sekitar 10 persen dari pendapatan tahunan mereka.
- Negara yang dilaporkan paling banyak dipengaruhi oleh suap skala kecil antara lain (disusun menurut abjad): Armenia, Azerbaijan, Irak, Kamerun, Kamboja, Liberia, Sierra Leone dan Uganda.
- Pengalaman suap skala kecil di tingkat sub nasional paling sering terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara, Negara-negara yang Baru Merdeka Afrika Sub Sahara.
- Walau pun kepolisian paling sering dilaporkan sebagai penerima suap di seluruh dunia, di tingkat sub nasional terlihat perbedaan. Di Timur Tengah dan Afrika Utara, yang dilaporkan sebagai lembaga paling rawan suap adalah lembaga yang menangani jual beli, waris dan sewa tanah. Di negara-negara Uni Eropa jasa-jasa seputar masalah tanah ini bersama dengan layanan kesehatan merupakan lembaga paling rawan terkena suap skala kecil. Di Amerika Utara, kasus-kasus suap kelihatannya sangat sedikit. Kalau pun ada, kasus yang dilaporkan biasanya yang terkait peradilan.
- Hasil menunjukkan bahwa responden dari keluarga berpenghasilan rendah cenderung untuk memberi suap pada saat berhubungan dengan polisi, peradilan, urusan pertahanan atau bahkan sistem pendidikan, dibandingkan mereka yang berasal dari keluarga berpenghasilan tinggi.

Rakyat biasa tidak merasa berdaya untuk bicara soal korupsi

- Publik umum tidak menggunakan saluran formal untuk menyampaikan keluhan mereka yang terkait dengan suap. Tiga per empat bagian dari mereka yang melaporkan kasus suap tidak menyampaikan keluhan formal.
- Sekitar separuh dari korban penyuaipan yang diwawancarai tidak berpendapat bahwa mekanisme keluhan yang sekarang ada bersifat efektif.. Pandangan ini cukup konsisten dan tidak dipengaruhi oleh jender, pendidikan mau pun usia responden.

Pemerintah dipandang tidak efektif dalam memerangi korupsi – sebuah pandangan yang secara konsisten dan memprihatinkan terus muncul di sebagian besar negara dari waktu ke waktu

- Secara keseluruhan, publik umum menganggap upaya pemerintah mereka untuk melawan korupsi tidak efektif. Hanya 31 persen yang berpendapat sebaliknya. Lima puluh enam persen beranggapan bahwa langkah-langkah anti korupsi yang diambil tidak efektif.

⁴ Responden ditanyai tentang enam sektor/lembaga: peradilan, media, parlemen atau legislatif, partai politik sektor swasta dan layanan publik .

- Tidak ada perubahan besar yang terlihat dari jawaban responden yang direkam mengenai upaya anti korupsi pemerintah di tahun 2009 jika dibandingkan dengan jawaban yang datang dari responden di negara-negara yang dinilai dalam Barometer edisi 2007.

Klasifikasi Regional

<p>Uni Eropa+ Islandia, Israel, Norwegia dan Swis</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Austria ▪ Bulgaria ▪ Republik Cheska ▪ Denmark ▪ Finlandia ▪ Yunani ▪ Hungaria ▪ Islandia ▪ Israel ▪ Italia ▪ Lithuania ▪ Luksemburg ▪ Belanda ▪ Norwegia ▪ Polandia ▪ Portugal ▪ Romania ▪ Spanyol ▪ Swis ▪ Inggris Raya 	<p>Asia Pasifik</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Brunei Darussalam ▪ Kamboja ▪ Hong Kong ▪ India ▪ Indonesia ▪ Jepang ▪ Korea Selatan ▪ Malaysia ▪ Pakistan ▪ Filipina ▪ Singapura ▪ Thailand <p>Amerika Latin</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Argentina ▪ Bolivia ▪ Cile ▪ Kolumbia ▪ El Salvador ▪ Panama ▪ Peru ▪ Venezuela 	<p>Afrika –Sub Sahara</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kamerun ▪ Ghana ▪ Kenya ▪ Liberia ▪ Nigeria ▪ Senegal ▪ Sierra Leone ▪ Uganda ▪ Zambia <p>Balkan Barat + Turki</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bosnia & Herzegovina ▪ Kroasia ▪ Kosovo ▪ FYR Makedonia ▪ Serbia ▪ Turki
<p>Negara-Negara Yang Baru Merdeka + Mongolia</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Armenia ▪ Azerbaijan ▪ Belarus ▪ Georgia ▪ Moldavia ▪ Mongolia ▪ Rusia ▪ Ukraina 	<p>Timur Tengah dan Afrika Utara</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Irak ▪ Kuwait ▪ Lebanon ▪ Maroko 	<p>North America</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kanada ▪ Amerika Serikat

Lampiran A: Mengenai Survei Barometer

Barometer Korupsi Global adalah jajak pendapat publik yang menilai persepsi umum publik dan pengalaman mereka terhadap korupsi dan suap. Survei Barometer 2009 mencakup 69 negara dan wilayah. Di dalam 50 negara yang dievaluasi, survei diselenggarakan oleh Gallup Internasional yang ditunjuk oleh Transparency Internasional. Survei ini adalah bagian dari Survei Suara Masyarakat. Di 19 negara yang tidak dicakup oleh Gallup, TI menugaskan organisasi pengumpulan pendapat lainnya untuk melaksanakan survei Barometer. Barometer Korupsi Global TI 2009 melibatkan 73.132 responden.

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Lapangan

Pengambilan data di lapangan dilakukan antara 25 Oktober 2008 dan 25 Februari 2009.

Variabel Demografis

Variabel demografis yang dipergunakan dalam kuesioner mencakup: usia, pendidikan, pendapatan keluarga, pekerjaan dan agama. Untuk membuat perbandingan, variabel-variabel ini diberi kode ulang.

Pengambilan Sampel

Jenis sampel yang paling banyak diambil adalah yang bersifat nasional, namun di beberapa negara sampel hanya diambil dari daerah perkotaan. Dalam konteks global, jenis temuan-temuan sangat didasarkan pada populasi daerah perkotaan. Di sebagian besar negara, metode pengambilan sampel didasarkan pada kuota, menggunakan jenis kelamin/usia/kondisi sosial ekonomi/proporsi regional/perkotaan sebagai variabel. Di beberapa negara telah digunakan sampel acak.

Wawancara dilaksanakan baik secara tatap-muka, menggunakan kuesioner yang disampaikan sendiri, lewat telepon atau internet (biasanya metode ini dipergunakan di negara-negara maju), melibatkan responden pria dan wanita berusia 16 tahun ke atas.

Pemberian Bobot

Pertama, ketidakseimbangan dikoreksi di tingkat negara agar mendapatkan sampel yang merepresentasikan populasi nasional—atau untuk mendapatkan sebuah sampel yang merepresentasikan suatu tempat tertentu – (misalnya, koreksi kecil terhadap proporsi kelompok umur, jender, dll). Kedua, setiap negara diberi bobot sesuai dengan populasi relatifnya pada saat menghitung angka gabungan global, regional dan lainnya.

Standar marjin kesalahan untuk survei ini adalah +/- 4 persen.

Pemberian Kode Data dan Pengujian Mutu

Pemberian kode data dan pengujian mutu dilakukan secara:

- Kuesioner akhir yang dikirimkan ke negara peserta survei ditandai dengan kolom, kode dan ditandai untuk dilubangi satu atau banyak. Badan-badan lokal mengikuti *layout* ini pada saat memasukkan data dan mengirim file data ASCII ke Pusat Koordinasi dengan mengikuti spesifikasi yang ditentukan. Jika diminta oleh sebuah negara, template SPSS, yang sudah diberi label dalam bahasa Inggris juga dikirimkan.
- Data diproses secara sentral, dengan menganalisis berbagai aspek yang berbeda, misalnya saja apakah semua kode yang dimasukkan sudah valid dan filter dipergunakan dengan baik dan konsisten.

- Jika ditemukan ada yang tidak konsisten, hal ini harus disampaikan kepada badan lokal agar mereka dapat mengevaluasi isu ini dan mengirimkan kembali data yang sudah diubah dan diperbaiki.
- Data untuk semua negara akhirnya dikonsolidasikan dan diberi bobot seperti yang dijelaskan di atas.
- Semua analisis dan validasi data dilakukan dengan menggunakan SPSS.

Pengujian konsistensi dilakukan pada dua tingkatan :

- Dengan menggunakan perangkat elektronik, sebagaimana dijelaskan di alinea di atas.
- Oleh peneliti berpengalaman di fase analisis; pengecekan dan pengawasan bahwa jawaban di setiap negara sama seperti yang diharapkan.

Melalui uji konsistensi beberapa kesalahan dapat ditemukan dan data yang mengandung kesalahan dipisahkan dari data lainnya. Hal ini untuk mencegah pemakaian data yang salah dari beberapa negara untuk dimasukkan ke dalam analisis keseluruhan hasil:

- Pertanyaan yang dihilangkan: Nomer 3 dan 4 di Italia; dan Nomer 2b di Liberia dan Sierra Leone.
- Kesalahan pemberian kode jawaban: pertanyaan 4a dan 4b di Armenia, Belarus, Kamboja, El Salvador dan Georgia.
- Tingkat jawaban 'Tidak tahu' yang lebih tinggi dari normal (lebih dari 80 persen responden): Pertanyaan 5 di Maroko dan Zambia.
- Perbedaan definisi dari semua variabel demografis: Armenia, Belarus, Cile, Kamboja, Georgia, Irak, Kenya dan Polandia. Karena itu pada saat memilah data dengan menggunakan karakteristik tersebut, negara-negara itu tidak dimasukkan dalam analisis.
- Perbedaan definisi variabel pendapatan: Italia. Karena itu dalam memilah data dengan menggunakan karakteristik ini, Italia tidak dimasukkan dalam analisis.

Country	Contact	Survey Conducted by	E-mail	Interview Mode	Sample Type	Size	Fieldwork Dates ¹
Argentina	Constanza Cilley	TNS Gallup Argentina	Constanza.cilley@tns-gallup.com.ar	Face to face	National	1000	20 – 26 Nov
Armenia	Merab Pachulia	Georgian Opinion Research Business International (Gorbi)	mpachulia@gorbi.com	Face to face	National	1000	25 Jan - 5 Feb
Austria	Ingrid Lusk	Karmasin Institute	i.lusk@gallup.at	Face to face	National	751	10 – 30 Nov
Azerbaijan	Musabayov Rasim	'PULS-R' Sociological Service	musabayov@gmail.com	Face to face	National	1000	25 Jan– 3 Feb
Belarus	Andrej Vardamatski	Novak Center	info@novak.by	Face to face	National	1044	23 Feb - 6 Mar
Bolivia	Luis Alberto Quiroga	Encuestas & Estudios	gerencia@encuestas-estudios.com	Face to face	Urban	1328	24 Nov – 10 Dec
Bosnia & Herzegovina	Aida Hadziavdic	MARECO INDEX BOSNIA	aida.hadziavdic@mib.ba	Telephone	National	500	10 – 26 Nov
Brunei Darussalam	Ibrahim Suffian	Merdeka Center	suffiani@gmail.com	Telephone	National	820	20 – 25 Feb
Bulgaria	Mirna Grigorova	TNS Balkan British Social Surveys Gallup International	m.grigorova@gallup-bbss.com	Face to face	National	1006	31 Oct – 7 Nov
Cambodia	Jean-Pierre Depasse	TNS Vietnam/Gallup International Association	Jean.Depasse@tns-global.com	Face to face	Main provinces	1019	12 – 24 Dec
Cameroon	Simplice Ngampon	Research & Marketing Services Cameroon	sngampon@rms-international.net	Face to face	Main cities	519	29 Oct – 2 Nov

¹ October, November and December dates refer to 2008. January, February and March dates refer to 2009.

Country	Contact	Survey Conducted by	E-mail	Interview Mode	Sample Type	Size	Fieldwork Dates ¹
Canada	Dianne Rousseau	Leger Marketing	drousseau@legermarketing.com	Computer Assisted Web Interview	National	1450	28 Oct – 2 Nov
Chile	María Francisca Gatica Cádiz	IPSOS Chile	Francisca.Gatica@ipsos.com	Face to face	Urban	1001	12 – 25 Feb
Colombia	Maria Jose Roldán	CNC	mroldan@cnccol.com	Telephone	Urban	600	31 Oct– 12 Nov
Croatia	Mirna Cvitan	PULS	Mirna.cvitan@puls.hr	Face to face	National	1000	1 – 20 Nov
Czech Republic	Jan Trojacek	Mareco	trojacek@mareco.cz	Face to face	National	1000	7 – 17 Nov
Denmark	Synne Nygaard	TNS - Gallup	synne.nygaard@tns-gallup.dk	Computer Assisted Web Interview	National	1002	20 – 28 Nov
El Salvador	Meril James	Gallup International Affiliate	meril.james@tns-global.com	Face to face	Urban	500	10 – 14 Mar
Finland	Sakari Nurmela	TNS Gallup OY	sakari.nurmela@gallup.fi	Panel online	National	1237	21 – 27 Nov
FYR Macedonia	Ivana Todevska	Brima	office@brima-gallup.com.mk	Face to face	National	1139	10 – 16 Nov
Georgia	Merab Pachulia	Georgian Opinion Research Business International (Gorbi)	mpachulia@gorbi.com	Face to face	National	1400	29 Jan– 9 Feb
Ghana	Vitus Azeem	Ghana Integrity Initiative (GII)	vitusaazem@yahoo.com	Face to face	National	1190	23 – 28 Feb
Greece	Lela Charavgi	TNS ICAP	lela.charavgi@tnsicap.gr	Telephone	National	500	17 Nov – 3 Dec
Hong Kong	Winnie Yiu	TNS Hong Kong	winnie.yiu@tns-global.com	Online via Access	National	1013	12 – 24 Nov

Country	Contact	Survey Conducted by	E-mail	Interview Mode	Sample Type	Size	Fieldwork Dates ¹
				Panels			
Hungary	Aniko Balogh	TARKI, Hungary	aniko.balogh@tarki.hu	Face to face	National	1060	10 – 19 Jan
Iceland	Andrea Gudbjorg	Capacent Gallup	gaj@capacent.is	Online Survey	National	1116	25 Nov – 1 Dec
Israel	Meril James	Gallup International Affiliate	meril.james@tns-global.com	Telephone	National	500	22 – 23 Feb
India	Maleeha Gul	TNS India	maleeha.gul@tns-global.com	Face to face	National	1063	24 Oct– 26 Nov
Indonesia	Muhammad Saflianto	TNS Indonesia	Muhammad.Saflianto@tns-global.com	Face to face	Urban	500	11 – 20 Nov
Iraq	Munqith Dagher	AICSS	munqith_dagher@iiacss.org	Face to face	Urban	800	29 Oct– 5 Nov
Italy	Paolo Colombo	Doxa	paolo.colombo@doxa.it	Face to face	National	1022	19 Nov – 1 Dec
Japan	Kiyoshi Nishimura	NRC	nisimura@nrc.co.jp	Face to face/ Self-administered	National	1200	5 – 17 Nov
Kenya	Roger Steadman	Steadman Group	roger@steadman-group.com	Face to face	National	2007	20 – 23 Dec
Kosovo (UN administration)	Assen Blagoev	BBSS Gallup International	A.Blagoev@gallup-bbss.com	Face to face	Urban Albanian population	1012	14 – 20 Nov
Kuwait	Amal Naim Majdalani	Pan Arab Research Center	amal@parc-leb.com	Face to face	National	801	6 – 30 Nov
Lebanon	Amal Naim Majdalani	Pan Arab Research Center	amal@parc-leb.com	Face to face	National	1200	22 Oct– 12 Nov
Liberia	Barry Aliou	StatView International	aliou_newton@yahoo.com	Face to face	National	1000	23 Feb – 4 Mar
Lithuania	Tomas Kontrimavičius	Vilmorus	tomas@vilmorus.lt	Face to face	National	1003	4 – 7 Dec
Luxembourg	Antonella Di Pasquale	TNS ILRES	Antonella.dipasquale@tns-ilres.com	Online Survey	National	504	3 – 7 Nov

Country	Contact	Survey Conducted by	E-mail	Interview Mode	Sample Type	Size	Fieldwork Dates ¹
Malaysia	Ibrahim Suffian	Merdeka Center	suffiani@gmail.com	Telephone	National	1236	13 – 18 Feb
Moldova	Vasile Cantarji	Centre of Sociological Investigations and marketing 'CBS AXA'	office@cbs-axa.org, cbs_axa@yahoo.com	Face to face	National	1086	November
Mongolia	Davaasuren Chuluunbat	IACC, Mongolia	davaasuren@iaac.mn	Face to face	National	1020	16 – 20 Feb
Morocco	Chadi Abdelhadi	TNS	Chadi.Abelhadi@tns-global.com	Face to face	Urban	500	26 Nov– 12 Dec
Netherlands	Fleur Ravensbergen	TNS NIPO	fleur.ravensbergen@tns-nipo.nl	Online Survey	National	1202	5 – 10 Nov
Nigeria	Femi Laoye	RMS Nigeria	olaoye@rms-africa.com	Face to face	National	5007	12 – 22 Dec
Norway	Ole Fredrick Uglund	TNS Gallup	olefredrick.ugland@tns-gallup.no	Web interview	National	1001	21 – 27 Nov
Pakistan	Fatima Idrees	Gallup Pakistan	fatima.idrees@gallup.com.pk	Face to face	National	2027	26 Oct – 10 Nov
Panama	Humberto Gonzales	PSM Sigma Dos Panama	psmcorreo@cwpanama.net	Telephone	Main Cities	502	6 – 22 Nov
Peru	Gustavo Yrala	Datum Internacional	gyrala@datum.com.pe	Face to face	National	1078	4 – 8 Dec
Philippines	Lawrence Dugan	Asia Research Organization	lawrence.dugan@asiaresearch.com.ph	Face to face	National	1000	3 – 23 Nov
Poland	Marek Fudala	Mareco Polska	marek.fudala@mareco.pl	Face to face	Urban	1026	25 – 30 Oct
Portugal	Ana Paraiba	TNS Euroteste	ana.paraiba@tns-global.com	Telephone	Urban	507	20 Nov - 6 Jan
Romania	Andrei Musetescu	CSOP	andrei.musetescu@csop.ro	Face to face	National	1149	17 – 23 Nov
Russia	Natalia Ivanisheva	Romir	ivanisheva.n@romir.ru	Online	National	1500	19 – 26 Nov

Country	Contact	Survey Conducted by	E-mail	Interview Mode	Sample Type	Size	Fieldwork Dates ¹
Serbia	Sladjana Brakus	TNS Medium Gallup Belgrade	sladjana.brakus@tnsmediumgallup.co.rs	Face to face	National	1015	21 – 27 Nov
Senegal	Mbathio Samb	Laboratoire de Recherches et d'Etudes sur la bonne Gouvernance	Samb.mbathio@gmail.com	Face to face	National	1480	9 – 16 Feb
Sierra Leone	Barry Aliou	StatView International	aliou_newton@yahoo.com	Face to face	National	1000	16 – 27 Feb
Singapore	Winnie Yiu	TNS Hong Kong	winnie.yiu@tns-global.com	Online via Access Panels	National	1015	12 – 24 Nov
South Korea	Hyunjeong Jung	Gallup Korea	hjujung@gallup.co.kr	Face to face	National	700	7 – 25 Nov
Spain	Gines Garridos	Sigmas Dos (Spain)	ggarridos@sigmados.com	Telephone	National	602	17 Nov – 29 Dec
Switzerland	Karin Maendlilerch	Isopublic	karin.maendlilerch@isopublic.ch	Face to face	National	1005	19 Nov – 3 Dec
Thailand	Tippayarat Wudhiprecha	TNS Thailand	tippayarat.wudhiprecha@tns-global.com	Telephone	National	500	17 – 28 Nov
Turkey	Bengi Ozboyaci	TNS PIAR	Bengi.ozboyaci@tns-global.com	Face to face	National	2000	1 Nov - 12 Dec
Uganda	Virginia Nkwanzu - Isingoma	The Steadman Group Uganda	virginia@steadman-group.co.ug	Face to face	National	1000	N/A
Ukraine	Alla Vlasyuk	TNS Ukraine	alla.vlasyuk@tns-global.com.ua	Face to face	National	1200	4 – 12 Nov
United Kingdom	Anita Emery	TNS	anita.emery@tns-global.com	Online	National	1018	27 Nov – 1 Dec
USA	Joe Vogt	TNS (US)	joe.vogt@tns-global.com	Online	National	1017	30 Oct – 4 Nov
Venezuela	Romel Romero	Sigma Dos Venezuela	romel@sigmados-international.com	Face to face	Main city	1030	7 – 25 Nov
Zambia	Virginia Nkwanzu - Isingoma	The Steadman Group Uganda	virginia@steadman-group.co.ug	Face to face	National	902	N/A

Appendix B: Table 1 Country/Territory classification according to income

High income	Upper middle income	Lower middle income	Low income
Austria	Argentina	Armenia	Cambodia
Brunei Darussalam	Belarus	Azerbaijan	Ghana
Canada	Bulgaria	Bolivia	Kenya
Czech Republic	Chile	Bosnia and Herzegovina	Liberia
Denmark	Croatia	Cameroon	Nigeria
Finland	Lebanon	Colombia	Pakistan
Greece	Lithuania	El Salvador	Senegal
Hong Kong	Malaysia	FYR Macedonia	Sierra Leone
Hungary	Panama	Georgia	Uganda
Iceland	Poland	India	Zambia
Israel	Romania	Indonesia	
Italy	Russia	Iraq	
Japan	Serbia	Kosovo	
Korea, south	Turkey	Moldova	
Kuwait	Venezuela	Mongolia	
Luxembourg		Morocco	
Netherlands		Peru	
Norway		Philippines	
Portugal		Thailand	
Singapore		Ukraine	
Spain			
Switzerland			
United Kingdom			
United States			

Source: World Bank classification from July 2008

www.siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/CLASS.XLS.

Appendix D: Tables by Country/Territory

Table 1: To what extent do you perceive the following institutions in this country to be affected by corruption? (1: not all corrupt, 5:extremely corrupt) Average score.

Country/Territory	Political Parties	Parliament/ Legislature	Business/ Private Sector	Media	Public Officials/Civil Servants	Judiciary	Average Score
Total Sample	3.9	3.7	3.5	3.2	3.8	3.5	3.6
Asia-Pacific	3.9	3.8	3.5	3.0	4.0	3.5	3.6
Brunei Darussalam	2.1	2.1	2.7	1.9	2.6	2.0	2.3
Cambodia	3.0	2.7	2.6	2.3	3.5	4.0	3.0
Hong Kong	3.3	2.7	3.9	3.6	3.0	2.5	3.2
India	4.2	3.6	3.4	2.9	3.7	3.2	3.5
Indonesia	4.0	4.4	3.2	2.3	4.0	4.1	3.7
Japan	4.3	3.9	3.8	3.6	4.3	3.2	3.9
Malaysia	3.9	3.3	3.4	2.7	3.7	3.1	3.4
Pakistan	3.5	3.7	3.5	3.0	4.1	3.8	3.6
Philippines	4.0	3.9	3.0	2.0	4.0	3.4	3.4
Singapore	2.1	1.8	2.7	2.5	2.2	1.8	2.2
South Korea	4.3	4.2	3.8	3.6	3.7	3.6	3.9
Thailand	4.1	3.1	3.2	2.8	3.6	2.8	3.3
EU+	3.7	3.4	3.4	3.3	3.4	3.1	3.4
Austria	3.3	2.6	2.9	3.0	2.7	2.4	2.8
Bulgaria	4.3	4.2	3.9	3.0	4.1	4.5	4.0
Czech Republic	3.6	3.5	3.4	2.9	3.7	3.4	3.4
Denmark	2.6	2.1	2.9	2.8	2.3	1.7	2.4
Finland	2.9	2.5	2.8	2.6	2.1	1.9	2.5
Greece	4.4	3.7	3.4	3.8	3.7	3.4	3.7
Hungary	4.2	3.8	4.3	3.7	3.6	3.1	3.8
Iceland	3.9	3.1	4.3	3.5	3.4	2.7	3.5
Israel	4.3	4.0	3.3	3.2	3.6	2.9	3.5
Italy	4.1	3.8	3.3	3.4	3.9	3.5	3.7
Lithuania	4.0	4.0	3.5	3.0	3.9	3.9	3.7
Luxembourg	3.2	2.9	3.7	3.5	3.2	3.0	3.3
Netherlands	2.6	2.3	3.1	2.8	2.7	2.3	2.6
Norway	3.1	2.7	3.8	3.5	3.2	2.5	3.1
Poland	3.5	3.4	3.6	3.4	3.8	3.4	3.5
Portugal	4.0	3.4	3.7	2.8	3.1	3.3	3.4
Romania	4.3	4.3	3.8	3.4	3.8	4.2	4.0
Spain	3.6	3.1	3.5	3.1	3.0	3.0	3.2
Switzerland	2.9	2.6	3.2	3.1	2.5	2.2	2.8
United Kingdom	3.6	3.3	3.5	3.5	3.2	2.8	3.3
Latin America	4.2	4.0	3.5	3.2	4.0	4.1	3.8
Argentina	4.4	4.2	3.7	3.3	4.3	4.2	4.0
Bolivia	4.5	4.2	3.4	3.3	4.1	4.4	4.0
Chile	4.2	3.9	3.8	3.4	4.0	4.2	3.9
Colombia	4.0	3.9	3.1	2.9	3.7	3.5	3.5
El Salvador	4.4	3.4	2.9	3.0	3.9	4.2	3.6
Panama	4.6	4.6	3.3	2.8	4.3	4.4	4.0
Peru	4.3	4.3	3.5	3.3	3.8	4.4	3.9
Venezuela	4.3	3.9	3.5	3.4	4.2	4.1	3.9
Middle East and North Africa	3.6	3.3	3.5	3.2	3.9	3.1	3.5
Iraq	3.7	3.4	3.6	3.3	3.9	3.1	3.5
Kuwait	2.3	1.8	3.0	2.4	3.4	1.7	2.5
Lebanon	4.1	3.8	3.4	3.4	3.9	3.3	3.6
Morocco	3.5	3.5	3.0	2.7	4.6	4.1	3.6
Newly Independent States+	3.9	3.9	3.7	3.5	4.4	4.0	3.9
Armenia	3.0	3.1	3.0	2.9	3.2	3.3	3.1
Azerbaijan	2.8	3.1	3.4	2.7	3.9	4.0	3.3
Belarus	3.2	3.0	3.4	3.0	3.7	3.4	3.4
Georgia	3.1	3.1	2.9	2.9	3.2	3.3	3.1
Moldova	3.6	3.4	3.7	3.1	3.6	3.7	3.5
Mongolia	3.9	3.9	3.3	3.0	3.6	4.1	3.7
Russia	3.9	3.9	3.7	3.5	4.5	3.9	3.9
Ukraine	4.4	4.5	4.3	3.8	4.5	4.5	4.3
North America	4.0	3.8	3.7	3.6	3.6	3.1	3.6
Canada	3.5	3.2	3.4	3.1	3.1	2.7	3.2
United States	4.0	3.9	3.7	3.7	3.7	3.2	3.7
Sub-Saharan Africa	4.1	3.7	3.2	2.9	3.7	3.6	3.5
Cameroon	4.1	3.8	3.7	3.5	4.3	4.5	4.0
Ghana	3.7	3.1	3.3	3.0	4.2	4.1	3.6
Kenya	4.0	4.0	3.3	1.8	4.1	4.0	3.5
Liberia	3.4	4.1	3.7	2.8	4.0	4.3	3.7
Nigeria	4.2	3.8	3.3	3.0	3.4	3.4	3.5
Senegal	3.7	3.7	3.1	2.9	3.9	3.8	3.6
Sierra Leone	4.0	3.8	3.9	2.6	4.3	4.3	3.8
Uganda	3.3	3.4	2.5	2.1	3.9	3.9	3.2
Zambia	3.5	2.8	2.9	2.2	4.1	3.8	3.2
Western Balkans + Turkey	3.6	3.5	3.7	3.4	3.7	3.5	3.6
Bosnia and Herzegovina	4.4	4.3	4.2	3.7	4.2	4.3	4.2
Croatia	4.1	4.1	4.2	3.7	4.2	4.4	4.1
FYR Macedonia	3.8	3.7	3.6	3.3	4.0	4.2	3.8
Kosovo	3.8	3.4	3.7	2.3	3.3	4.0	3.4
Serbia	4.1	3.8	3.9	3.7	3.9	3.9	3.9
Turkey	3.4	3.4	3.6	3.4	3.6	3.3	3.5

Source: Transparency International Global Corruption Barometer 2009. Figures are weighted. Shaded scores are the highest for that particular country.

Table 2: Which of these six sectors/organisations would you consider to be the most affected by corruption?

Country/Territory	Political Parties	Parliament/ Legislature	Business/ Private Sector	Media	Public officials/ Civil Servants	Judiciary
Total	29%	16%	14%	6%	26%	9%
Asia-Pacific	31%	15%	9%	4%	33%	8%
Brunei Darussalam	10%	3%	44%	4%	33%	6%
Cambodia	9%	2%	3%	0%	23%	62%
Hong Kong	10%	2%	59%	15%	11%	3%
India	58%	10%	9%	8%	13%	3%
Indonesia	11%	47%	3%	1%	19%	20%
Japan	40%	4%	5%	3%	46%	1%
Malaysia	42%	4%	12%	1%	37%	5%
Pakistan	12%	14%	12%	8%	40%	14%
Philippines	28%	26%	3%	1%	35%	7%
Singapore	10%	5%	66%	8%	9%	2%
South Korea	38%	34%	9%	3%	12%	4%
Thailand	54%	6%	9%	2%	22%	7%
EU+	32%	11%	23%	9%	18%	9%
Austria	35%	4%	28%	17%	11%	5%
Bulgaria	21%	21%	5%	1%	13%	38%
Czech Republic	23%	12%	12%	5%	40%	9%
Denmark	13%	5%	53%	18%	9%	2%
Finland	39%	6%	35%	15%	3%	2%
Greece	58%	7%	4%	10%	16%	5%
Hungary	42%	9%	34%	5%	8%	2%
Iceland	23%	4%	55%	8%	9%	1%
Israel	40%	23%	6%	7%	19%	5%
Italy	44%	9%	7%	4%	27%	8%
Lithuania	16%	23%	8%	3%	27%	23%
Luxembourg	20%	4%	43%	15%	12%	7%
Netherlands	9%	5%	58%	10%	11%	7%
Norway	6%	5%	62%	7%	16%	3%
Poland	23%	10%	21%	7%	31%	8%
Portugal	29%	5%	33%	4%	15%	14%
Romania	17%	33%	13%	4%	15%	18%
Spain	27%	8%	29%	9%	15%	12%
Switzerland	23%	4%	38%	21%	9%	5%
United Kingdom	30%	14%	27%	15%	10%	3%
Latin America	34%	20%	5%	3%	17%	21%
Argentina	38%	13%	5%	4%	27%	13%
Bolivia	36%	11%	5%	5%	21%	23%
Chile	32%	10%	9%	3%	18%	27%
Colombia	41%	26%	5%	3%	14%	12%
El Salvador	53%	11%	1%	2%	14%	19%
Panama	30%	38%	3%	1%	14%	13%
Peru	18%	30%	4%	2%	7%	39%
Venezuela	34%	8%	3%	11%	30%	14%
Middle East and North Africa	26%	9%	11%	5%	43%	6%
Iraq	27%	10%	13%	5%	42%	4%
Kuwait	13%	9%	10%	12%	54%	2%
Lebanon	36%	14%	5%	9%	29%	8%
Morocco	8%	6%	4%	2%	62%	19%
Newly Independent States+	10%	11%	10%	3%	54%	13%
Armenia	11%	12%	12%	13%	18%	33%
Azerbaijan	1%	4%	16%	1%	49%	29%
Belarus	12%	5%	15%	8%	38%	22%
Georgia	12%	16%	9%	6%	21%	37%
Moldova	17%	15%	25%	5%	19%	18%
Mongolia	22%	21%	4%	3%	23%	28%
Russia	9%	8%	9%	3%	63%	8%
Ukraine	12%	25%	11%	2%	28%	21%
North America	21%	28%	23%	13%	13%	2%
Canada	30%	12%	32%	8%	13%	5%
United States	20%	30%	22%	13%	13%	2%
Sub-Saharan Africa*	47%	13%	5%	3%	18%	14%
Cameroon	18%	3%	5%	4%	35%	34%
Ghana	17%	5%	4%	3%	38%	33%
Kenya	14%	20%	5%	1%	35%	25%
Nigeria	63%	14%	5%	3%	9%	5%
Senegal	23%	9%	6%	7%	27%	27%
Uganda	13%	12%	4%	1%	34%	36%
Zambia	16%	4%	5%	2%	49%	25%
Western Balkans + Turkey	21%	12%	19%	8%	26%	14%
Bosnia and Herzegovina	49%	14%	9%	1%	8%	19%
Croatia	13%	9%	11%	3%	20%	44%
FYR Macedonia	11%	6%	7%	3%	23%	50%
Kosovo	28%	11%	11%	1%	10%	39%
Serbia	30%	14%	17%	7%	17%	15%
Turkey	14%	13%	25%	10%	35%	3%

Source: Transparency International Global Corruption Barometer 2009. Figures are weighted. Shades indicate the higher percentage for each particular country. *Sierra Leone and Liberia are excluded.

Table 3: In the past 12 months, have you or anyone living in your household paid a bribe in any form?

Country/Territory	Percentage of respondents who paid a bribe
Total	13%
Asia-Pacific	10%
Brunei Darussalam	1%
Cambodia	47%
Hong Kong	7%
India	9%
Indonesia	29%
Japan	1%
Malaysia	9%
Pakistan	18%
Philippines	11%
Singapore	6%
South Korea	2%
Thailand	11%
EU+*	5%
Austria	2%
Bulgaria	5%
Czech Republic	11%
Denmark	1%
Finland	2%
Greece	18%
Hungary	14%
Iceland	2%
Israel	1%
Lithuania	30%
Luxembourg	4%
Netherlands	1%
Norway	2%
Poland	4%
Portugal	2%
Romania	14%
Spain	2%
Switzerland	1%
United Kingdom	3%
Latin America*	10%
Argentina	4%
Bolivia	30%
Chile	10%
Colombia	8%
Panama	4%
Peru	20%
Venezuela	28%
Middle East and North Africa*	40%
Iraq	44%
Kuwait	20%
Lebanon	14%
Newly Independent States+	28%
Armenia	43%
Azerbaijan	46%
Belarus	13%
Georgia	2%
Moldova	28%
Mongolia	32%
Russia	31%
Ukraine	21%
North America	2%
Canada	2%
United States	2%
Sub-Saharan Africa*	26%
Cameroon	55%
Ghana	42%
Kenya	37%
Liberia	87%
Nigeria	17%
Senegal	39%
Sierra Leone	62%
Uganda	55%
Western Balkans + Turkey	4%
Bosnia and Herzegovina	9%
Croatia	4%
FYR Macedonia	4%
Kosovo	13%
Serbia	20%
Turkey	2%

Source: Transparency International Global Corruption Barometer 2009. Figures are weighted and exclude 'Don't know' answers. *El Salvador, Morocco and Zambia are excluded due to problems in survey implementation. Question not asked in Italy and figures not included for El Salvador, Morocco and Zambia due to problems with data. (See Appendix A for details.)

Table 4: How would you assess your current government's actions in the fight against corruption?

Country/Territory	Ineffective	Neither	Effective
Total	56%	13%	31%
Asia-Pacific	62%	14%	25%
Brunei Darussalam	17%	5%	78%
Cambodia	28%	5%	67%
Hong Kong	12%	0%	88%
India	45%	13%	42%
Indonesia	19%	7%	74%
Japan	68%	21%	11%
Malaysia	67%	6%	28%
Pakistan	51%	24%	25%
Philippines	77%	2%	21%
Singapore	4%	0%	96%
South Korea	81%	3%	16%
Thailand	65%	6%	28%
EU+	56%	20%	24%
Austria	57%	11%	32%
Bulgaria	76%	14%	10%
Czech Republic	64%	27%	9%
Denmark	22%	29%	49%
Finland	50%	0%	50%
Greece	76%	12%	12%
Hungary	70%	23%	7%
Iceland	47%	37%	16%
Israel	86%	0%	13%
Italy	69%	15%	16%
Lithuania	84%	13%	3%
Luxembourg	18%	34%	48%
Netherlands	34%	6%	60%
Norway	61%	0%	39%
Poland	43%	36%	21%
Portugal	73%	10%	16%
Romania	69%	11%	20%
Spain	44%	27%	29%
Switzerland	26%	33%	41%
United Kingdom	39%	30%	31%
Latin America	61%	13%	26%
Argentina	81%	12%	7%
Bolivia	43%	18%	39%
Chile	59%	20%	21%
Colombia	34%	4%	62%
El Salvador	53%	36%	11%
Panama	65%	25%	10%
Peru	71%	17%	12%
Venezuela	65%	21%	14%
Middle East and North Africa	50%	17%	34%
Iraq	49%	18%	33%
Kuwait	23%	9%	68%
Lebanon	65%	7%	28%
Morocco	64%	15%	21%
Newly Independent States+	55%	24%	21%
Armenia	48%	14%	38%
Azerbaijan	62%	23%	14%
Belarus	29%	20%	51%
Georgia	21%	22%	57%
Moldova	40%	21%	39%
Mongolia	47%	22%	31%
Russia	52%	26%	22%
Ukraine	73%	19%	7%
North America	72%	0%	28%
Canada	63%	0%	37%
United States	73%	0%	27%
Sub-Saharan Africa	28%	13%	59%
Cameroon	63%	5%	33%
Ghana	34%	8%	58%
Kenya	62%	14%	24%
Liberia	45%	8%	48%
Nigeria	14%	15%	71%
Senegal	72%	12%	16%
Sierra Leone	25%	12%	64%
Uganda	45%	7%	48%
Zambia	49%	9%	42%
Western Balkans + Turkey	53%	14%	33%
Bosnia and Herzegovina	71%	14%	16%
Croatia	71%	14%	16%
FYR Macedonia	18%	18%	65%
Kosovo	43%	14%	43%
Serbia	58%	14%	28%
Turkey	52%	14%	35%

Source: Transparency International Global Corruption Barometer 2009. Figures are weighted. Percentages may not add up to 100 per cent due to rounding.

Pertanyaan Yang Sering Diajukan

Barometer Korupsi Global *Transparency International*

1. Apakah Barometer Korupsi Global itu? Mengapa barometer ini bersifat unik ?
2. Siapa yang melaksanakan survei?
3. Siapa yang menjadi obyek survei dalam Barometer ?
4. Kapan dan bagaimana survei dilaksanakan ?
5. Negara/wilayah mana yang dicakup oleh Barometer 2009?
6. Negara/wilayah mana yang baru ditambahkan ke dalam Barometer 2009?
7. Negara/wilayah mana yang tidak ada dalam Barometer 2009 namun termasuk dalam Barometer edisi sebelumnya?
8. Apakah negara saya dapat dimasukkan ke Barometer edisi berikut?
9. Dapatkah beragam edisi Barometer diperbandingkan ?
10. Bagaimana Barometer dapat dipergunakan ?
11. Bagaimana TI menjamin mutu Barometer?
12. Bagaimana Barometer didanai?
13. Apa beda Barometer dengan Indeks Persepsi Korupsi TI?
14. Apa beda Barometer dengan Indeks Suap TI ?
15. Apa beda Barometer dengan Laporan Korupsi Global TI ?

1. Apakah Barometer Korupsi Global itu? Mengapa barometer ini bersifat unik?

Barometer Korupsi Global *Transparency International* (atau secara singkat disebut Barometer) adalah satu-satunya survei pandangan umum dunia mengenai pendapat dan pengalaman publik terkait dengan korupsi. Sebagai suatu jajak pendapat mengenai publik, Barometer memberikan sebuah indikator bagaimana korupsi telah memengaruhi hidup orang perseorangan di tingkat nasional dan bagaimana publik memandang upaya pengendalian korupsi di seluruh dunia

Barometer 2009, yang merupakan edisi ke 6, mencerminkan tanggapan 73.132 orang di 69 negara, dan memuat jumlah negara paling banyak dibanding yang dimuat oleh edisi sebelumnya.

Barometer ini mencakup pertanyaan terkait dengan korupsi, termasuk lembaga dalam negeri mana yang dianggap paling korup dan bagaimana responden menilai upaya pemerintah mereka memerangi korupsi. Barometer juga memberikan pandangan bagaimana orang mengalami suap, di samping mengumpulkan informasi seberapa sering warga negara diminta memberi suap pada saat berurusan dengan berbagai kantor layanan publik.. Untuk pertama kalinya, Barometer meminta pendapat publik mengenai penyalahgunaan (*state capture*) dengan memengaruhi pembuatan kebijakan publik dan peraturan melalui suap. Barometer juga

melihat sejauh mana konsumen bersedia membayar semacam premi untuk perilaku perusahaan yang bersih.

2. Siapa yang melaksanakan survei?

Sebagian besar survey dilaksanakan untuk TI oleh Gallup Internasional, yang merupakan bagian dari “Survei terhadap Suara Masyarakat.” Gallup menggunakan afiliasinya yang ada di suatu negara untuk menerjemahkan dan melaksanakan survey yang hasilnya akan dipergunakan oleh Barometer. Untuk memperluas cakupan survei tahun 2009, TI berhasil mendayagunakan 15 organisasi jajak pendapat baru untuk melaksanakan survei Barometer di 18 negara yang tidak dapat dicakup oleh Gallup: Armenia, Azerbaijan, Brunei Darussalam, Kamboja, Cili, El Salvador, Georgia, Gana, Hungaria, Israel, Liberia, Lithuania, Malaysia, Mongolia, Senegal, Sierra Leone, Uganda, dan Zambia. Data untuk Belarus disumbangkan kepada TI oleh sebuah lembaga akademik.

3. Siapa yang menjadi obyek survei dalam Barometer ?

Sebagai suatu jajak pendapat publik, Barometer mencerminkan pandangan wakil dari populasi suatu negara yang berusia 16 tahun ke atas. Untuk menjamin adanya representasi yang akurat, beberapa sampel dari negara diberi bobot menurut usia, jender dan pendapatan. Sampel yang dikumpulkan berasal dari kategori sampel nasional dan sampel tingkat kota. Untuk memastikan bahwa sampel negara merepresentasikan populasi nasional dan global, sampel ini diberi bobot sesuai dengan ukuran populasi negara yang direpresentasikannya.

4. Kapan dan bagaimana survei dilaksanakan ?

Pekerjaan lapangan dilaksanakan antara Oktober 2008 sampai Maret 2009. Di setiap negara, metode pengumpulan pendapat didasarkan pada situasi lokal. Metode itu mencakup wawancara yang dilakukan secara tatap muka, lewat telepon, mau pun lewat internet (*on line*).

5. Negara/wilayah mana yang dicakup oleh Barometer 2009?

Negara/wilayah yang dicakup oleh Barometer 2009 adalah: Argentina, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Bolivia, Bosnia dan Herzegovina, Brunei Darussalam, Bulgaria, Kamboja, Kamerun, Kanada, Cile, Kolumbia, Kroasia, Republik Cheska, Denmark, El Salvador, Finlandia, FYR Makedonia, Georgia, Ghana, Yunani, Hong Kong, Hungaria, Islandia, India, Indonesia, Irak, Israel, Italia, Jepang, Kenya, Kosovo, Kuwait, Lebanon, Liberia, Lithuania, Luksemburg, Malaysia, Moldavia, Mongolia, Maroko, Belanda, Nigeria, Norwegia, Pakistan, Panama, Peru, Filipina, Polandia, Portugal, Rumania, Rusia, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Singapura, Korea Selatan, Spanyol, Swiss, Thailand, Turki, Uganda, Ukraina, Inggris Raya, Amerika Serikat, Venezuela and Zambia.

6. Negara/wilayah mana yang baru ditambahkan ke dalam Barometer 2009?

Negara yang masuk dalam Barometer 2009 tapi tidak termasuk dalam Barometer 2007 adalah: Azerbaijan, Belarus, Brunei Darussalam, Cile, El Salvador, Hungaria, Irak, Israel, Kenya, Kuwait, Lebanon, Liberia, Mongolia, Maroko, Sierra Leone, Uganda and Zambia.

7. Negara/wilayah mana yang tidak ada dalam Barometer 2009 namun termasuk dalam Barometer edisi sebelumnya?

Negara yang masuk dalam Barometer 2007 tapi tidak termasuk dalam Barometer 2009 adalah: Albania, Republik Dominika, Ekuador, Prancis, Jerman, Guatemala, Irlandia, Afrika Selatan, Swedia, dan Vietnam.

Karena TI menugaskan Gallup International untuk melaksanakan sebagian besar pekerjaan lapangan untuk mencari data Barometer melalui jaringan afiliasinya di seluruh dunia, ada kasus di mana, untuk alasan keuangan, organisasional, atau politis, afiliasi ini tidak dapat melaksanakan survei di negara tertentu di tahun tertentu. Negara itu tidak dapat dimasukkan ke dalam survey sampai TI menugaskan perusahaan lain untuk melakukan survei Barometer secara andal dan terjangkau.

8. Apakah negara saya dapat dimasukkan ke Barometer edisi berikut?

Tidak ada pembatasan mengenai negara/wilayah mana yang dapat diikutsertakan dalam survei Barometer. Tahun 2009, sebagai mana halnya tahun-tahun sebelumnya, TI berhasil menugaskan pelaksanaan survei di beberapa negara yang tidak dapat dicakup oleh Gallup International. Jika memungkinkan dari segi dana, TI berharap dapat terus menambah jumlah negara yang dicakup oleh survei Barometer di tahun-tahun mendatang.

9. Dapatkah beragam edisi Barometer diperbandingkan ?

Ya. Karena beberapa pertanyaan telah diulang dalam berbagai edisi, Barometer memungkinkan dilakukannya perbandingan langsung dan identifikasi tren yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Barometer sekarang merupakan edisi keenam dan karenanya kita dapat melakukan penilaian terhadap perubahan yang terjadi dalam periode tertentu di lembaga-lembaga yang oleh masyarakat dianggap paling korup. Kita juga dapat menilai efektifitas upaya pemerintah dalam memerangi korupsi, di samping melihat persentase warga negara yang memberi suap untuk mendapatkan layanan publik. Edisi sebelumnya juga meneliti perubahan harapan masyarakat terhadap bagaimana korupsi akan berevolusi di masa mendatang.

Untuk melihat edisi-edisi Barometer terdahulu kunjungi:

www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb

10. Bagaimana Barometer dapat dipergunakan ?

Barometer merupakan sumber yang kaya akan data empiris mengenai pandangan dan pandangan publik terkait korupsi.

Pembuat keputusan dapat menggunakan Barometer untuk memahami secara lebih baik sejauh mana lembaga pemerintah dan layanan umum dianggap bersifat korup. Pembuat keputusan juga dapat memperluas pengetahuan mereka terhadap bentuk dan frekwensi kasus suap skala kecil, selain melihat distribusi demografis praktek suap dan persepsi mengenai integritas lembaga-lembaga dalam negeri. Barometer memuat informasi yang sangat berguna untuk membantu melakukan reformasi di bidang kebijakan dan untuk merancang penelitian lanjutan.

Masyarakat madani, peneliti, pemangku kepentingan anti-korupsi dan wartawan dapat menggunakan data Barometer untuk melihat di mana korupsi ada, meningkatkan kesadaran terhadap tingkat korupsi di sebuah atau di beberapa negara dan untuk mendukung target terjadinya perubahan di sebuah negara atau lembaga tertentu.

Peneliti dapat menggunakan Barometer untuk menjajaki faktor-faktor yang menentukan terjadinya korupsi dan akibat yang ditimbulkan korupsi dan suap di sejumlah besar negara. Dilihat dari sisi fokus dan banyaknya negara yang dicakup, Barometer bersifat unik di kalangan komunitas peneliti.

11. Bagaimana TI menjamin mutu Barometer?

Kuesioner Barometer diperiksa oleh Komite Penasehat Indeks TI, yang terdiri dari para ahli internasional terkemuka di bidang korupsi, para ahli ekonometrik dan statistik. Anggota Komite memberikan saran untuk memperbaiki Barometer. Namun, manajemen TI lah yang membuat keputusan akhir mengenai rancangan survei dan publikasinya. Gallup International, yang melaksanakan survei di sebagian besar negara atas nama TI, memeriksa data sebagai bagian dari uji kelayakan yang dilakukan untuk "Survei atas Suara Masyarakat" (*Voice of the People Survey*). Gallup juga melaksanakan kendali mutu atas data yang dikumpulkan perusahaan jajak pendapat lain di 18 negara.

12. Bagaimana Barometer didanai?

TI didanai oleh badan-badan pembangunan multilateral dan bilateral, selain oleh yayasan internasional, perusahaan dan perseorangan. Sejak 2006, alar ukur korupsi yang dibuat oleh *Transparency International* telah didukung sebagian oleh Ernst & Young. Tahun 2009, the Barometer juga menerima dana dari pemerintah Brunei Darussalam dan dari Organisasi Makanan dan Pertanian PBB (*UN Food and Agricultural Organisation*). Kesiediaan TI untuk menerima bantuan dana tidak menunjukkan persetujuan TI terhadap kebijakan perusahaan, pemerintah atau pun lembaga pemberi bantuan dan tidak melibatkan mereka dalam

pengelolaan proyek-proyek TI. Untuk keterangan lebih rinci mengenai sumber dana Transparency International, silakan lihat

http://www.transparency.org/support_us_

13. Apa beda Barometer dengan Indeks Persepsi Korupsi TI?

Barometer melakukan penilaian terhadap pandangan umum publik mengenai korupsi, sementara Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perceptions Index -CPI*) mengumpulkan pandangan para ahli. Jika Barometer juga menilai pengalaman perseorangan di kasus-kasus korupsi kecil, *CPI* mencerminkan persepsi pengamat ahli mengenai korupsi di sektor pemerintahan dan politik secara lebih luas. Walau pun kedua survei ini berbeda, setiap tahun keduanya menunjukkan adanya korelasi cukup tinggi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai *CPI*, silakan lihat: www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi.

14. Apa beda Barometer dengan Indeks Suap TI ?

Barometer adalah jajak pendapat umum, sementara Indeks Suap dibuat berdasarkan sebuah survei dari kalangan eksekutif bisnis. Barometer memuat pandangan masyarakat umum mengenai korupsi dan dampaknya dalam kehidupan mereka, termasuk pengalaman pribadi saat dituntut untuk memberikan suap. Indeks Suap 2008 melakukan penilaian dari sisi pemberi suap di dunia internasional terhadap 22 negara terkaya dan paling berpengaruh di bidang ekonomi dan melihat kecenderungan perusahaan di negara-negara itu melakukan suap di luar negeri. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai Indeks Suap, silakan lihat Indeks Suap *Transparency International* Tahun 2008: Laporan Umum (*Transparency International Bribe Payers Index 2008: Overview Report*):

http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/bpi

15. Apa beda Barometer dengan Laporan Korupsi Global TI ??

Barometer TI menjajaki pendapat dan pengalaman warga negara terkait dengan korupsi, sementara Laporan Korupsi Global yang diterbitkan oleh *Cambridge University Press*, adalah sebuah penilaian mendalam terhadap keadaan korupsi di seluruh dunia. *GCR* edisi berikut yang akan diluncurkan musim gugur 2009 akan memfokuskan pada korupsi di sektor swasta. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai *GCR*, silakan lihat <http://transparency.org/publications/gcr>